



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Jl.Prof.Dr.H.Aziz Haily MA
Bukit Limau Sarilamak Telp/Fax : 0752-7470736

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : / /S-Kep/INAKER.1/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),
PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (ASISTEN PPTK), PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD), PEMBANTU PPK-SKPD,
DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pembantu PPK-SKPD, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4186);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor);
 15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 91);
 16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 89);
 17. Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020;
 18. Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Menunjuk pejabat yang namanya tersebut pada kolom 2 dengan jabatan yang tersebut pada kolom 3 dan besaran honorarium yang diterima sebagaimana tersebut dalam kolom 6 serta tugas sebagaimana terdapat dalam poin II dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pembantu PPK-SKPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Lima Puluh Kota.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 (DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2020).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SARILAMAK
PADA TANGGAL : Januari 2020

**Pit. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

AFRIZAL, S.Sos.,M.Si
NIP. 19720817 199202 1 001

Tembusan : disampaikan kepada kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian
3. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : / /S-Kep /INAKER.1//2020
 TANGGAL : JANUARI 2020
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (ASISTEN PPTK) TAHUN ANGGARAN 2020 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

I. Nama PPTK, Pembantu PPTK, Kegiatan dan Anggaran serta Honorarium per Bulan

No	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	ALIZAR, S.Pd NIP. 19640830 198308 1 001	PPTK	Semua Kegiatan Sekretariat	848.984.000,-	700.000,-
	DEVI, ST.,M.Si NIP. 19760519 200112 2 005	Pembantu PPTK	Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. Pembangunan gedung kantor 14. Pengadaan peralatan gedung kantor 15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13.000.000,- 46.240.000,- 7.000.000,- 270.000.000,- 78.000.000,- 68.500.000,- 60.260.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 6.000.000,- 78.500.000,- 64.634.000,- 25.000.000,- 14.250.000,- 22.500.000,- 60.000.000,- 9.500.000,- 4.600.000,-	500.000,-

			19. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000,-	
2.	DEBBY SEPRIMA, SE NIP. 19750901 200701 2 003	PPTK	Semua Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Industri	711.872.200,-	675.000,-
	HERIWATI, SP NIP. 19640222 200212 2 001		Kegiatan : 1. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 2. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	253.178.000,- 96.304.200,-	450.000,-
	HERLINA EFENDI, ST NIP. 19800315 200301 2 007	Pembantu PPTK	Kegiatan : 1. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM 2. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 3. Kebijakan keterkaitan industri hulu - hilir	20.577.000,- 31.500.000,- 283.060.000,-	450.000,-
	ELMIWATI, S. Sos NIP. 19631015 198802 2 002	Pembantu PPTK	Kegiatan : 1. Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	27.253.000,-	450.000,-
3.	ZULFAHMI, SE NIP. 19650703 199103 1 004	PPTK	Semua Kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengawasan	282.619.800,-	650.000,-

			Industri		
	AFRIMAN JAHAR, SE.,MM NIP. 19700420 200701 1 006	Pembantu PPTK	Kegiatan : 1. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	83.613.800,-	400.000,-
	AMRINALDI NIP. 19640703 198603 1 001	Pembantu PPTK	Kegiatan : 1. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 2. Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya	96.606.000,- 42.000.000,-	400.000,-
	ZULHAN, S.Sos NIP. 19650410 198602 1 001	Pembantu PPTK	Kegiatan : 1. Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	60.400.000,-	400.000,-
4.	IRWANDI, SH NIP. 19620822 198603 1 005	PPTK	Semua Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan	471.658.000,-	650.000,-
	NOVRIZAL, S.Sos NIP. 19621231 199103 1 068	Pembantu PPTK	Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	362.482.000,- 6.000.000,-	400.000,-
	NUSA PUTRA GUSTI NIP. 19620808 199203 1 003	Pembantu PPTK	Kegiatan : 1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan	46.280.000,- 25.000.000,-	400.000,-
	ICHWAN HAFNI, ST.,MM NIP. 19770114 200212 1 003	Pembantu PPTK	Kegiatan : 1. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	31.896.000,-	400.000,-
5.	ISMAIL, S.Pd.,M.Pd NIP. 19611221 198210 1 001	PPTK	Semua Kegiatan Bidang Transmigrasi	38.097.000,-	500.000,-
	HARDISON, SST NIP. 19690511 199003 1 001	Pembantu PPTK	Kegiatan : 1. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	10.257.000,-	300.000,-
	AZWAR, SH NIP. 19651028 198703 1 007	Pembantu PPTK	Kegiatan : 1. Penguatan SDM Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan	27.840.000,-	300.000,-

II. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

- c. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Asisten PPTK) bertugas membantu PPTK dalam hal :

- a. Dalam proses pelaksanaan dan administrasi kegiatan;
- b. Mempersiapkan bahan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : Januari 2020

**Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

AFRIZAL, S.Sos.,M.Si
NIP. 19720817 199202 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : / /S-Kep/INAKER.1/1/2020
TANGGAL : JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-OPD) DAN PEMBANTU PPK-OPD TAHUN ANGGARAN 2020 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

I. Nama PPK-OPD dan Honorarium per Bulan

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
1.	YANTI AFLINDA, SE NIP. 19720418 200604 2 005	PPK – OPD	650.000,-

II. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) bertugas sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh PPK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melakukan akuntansi OPD; dan
7. Menyiapkan laporan keuangan OPD.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : Januari 2020

**Pt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

AFRIZAL, S.Sos.,M.Si
NIP. 19720817 199202 1 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : / /S-Kep/INAKER.1/1/2020
TANGGAL : JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2020 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

I. Nama Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Honorarium per Bulan

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
1.	LISWATI NIP. 19650219 198908 2 001	Pembantu Bendahara Pengeluaran	450.000,-

II. Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pembantu bendahara pengeluaran bertugas membantu bendahara pengeluaran dalam hal :

- a. Membuat dokumen pengeluaran uang (Pembuat SPP LS, SPP Gaji, SPP GU/TU/UP); dan
- b. Menertibkan administrasi pembukuan keuangan.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : Januari 2020

**Pit. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

AFRIZAL, S.Sos.,M.Si
NIP. 19720817 199202 1 001